

# EVALUASI SISTEM PERWILAYAHAN DI WILAYAH JOGLOSEMAR BERDASARKAN ASPEK SOSIO EKONOMI

Achmad Wismoro, Solikhah Retno Hidayati  
Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta  
wironowosttnas@yahoo.com, retno\_srh@sttnas.ac.id

## ABSTRACT

*Ketimpangan dalam perkembangan wilayah seringkali terjadi, di mana kota-kota besar semakin dominan dan kota-kota kecil justru semakin tertinggal. Di sisi lain, kota-kota kecil tersebut memiliki potensi untuk berkembang hingga mencapai tingkat tertentu.*

*Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai tipologi kota-kota kecil tersebut berdasarkan pada ukuran, jenis, dan spesialisasinya. Alat analisis yang digunakan adalah metode LQ, Indeks sentralitas, dan Tipologi Klassen. Lokasi studi adalah kota-kota kecamatan yang terletak di koridor Semarang-Yogya-Solo, yang terdiri atas 26 kota kecil. Analisis yang dilakukan meliputi analisis pemusatan wilayah, tipologi kota, dan spesialisasi kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemusatan terjadi di dua titik, yaitu di kecamatan Depok (Sleman) dan Magelang tengah. Hasil analisis spesialisasi kota menunjukkan bahwa lima kota yang mempunyai spesialisasi di sektor primer, yaitu Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Megelang Tengah. Kota-kota lain menunjukkan spesialisasi di sektor sekunder dan tersier. Hal ini berarti bahwa kota-kota kecil di sepanjang koridor Joglosemar telah mengalami transformasi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Sedangkan hasil analisis tipologi Klassen menunjukkan bahwa 14 kota kecamatan termasuk dalam kategori progresif dan berkembang.*

*Kata kunci: tipologi kota, kota kecil, Joglosemar*

## 1. Pendahuluan

Selama ini, konsep pengembangan wilayah menganut konsep kutub pertumbuhan. Konsep ini menurut Douglass (1998) dilakukan dengan jalan mengalokasikan investasi yang tinggi di sektor industri di pusat kota yang besar. Harapannya, pertumbuhan ekonominya dapat menyebar dan membangkitkan pembangunan wilayah di sekitarnya (*spread effect*). Namun yang terjadi justru sebaliknya, yaitu efek polarisasi lebih besar daripada penyebaran.

Efek polarisasi membentuk pola keterkaitan berupa interaksi langsung melalui kota-kota antara (kota kecil atau menengah). Hal ini mengakibatkan kota besar makin berkembang, antara desa dengan kota utama, tanpa sementara kota kecil cenderung makin menurun peran dan fungsinya karena segala sumberdaya terserap ke kota besar.

Secara hirarkis, kota kecil mampu menahan dominasi kota besar, dan berfungsi sebagai pusat proses transformasi di perdesaan (Pradhan, 2003). Namun pendapat lain menyatakan bahwa kota kecil tidak mampu berperan sebagai pusat pelayanan perdesaan di sekitarnya. Salah satu fenomena yang terjadi adalah terjadinya pergerakan penduduk dari desa ke kota-kota besar (Dias, 1984 dalam Pradhan, 2003). Hal ini membuktikan bahwa ada kesenjangan yang mengakibatkan kota kecil tidak mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi desa-desa di sekitarnya.

Demikian pula dalam konsep pengembangan kawasan strategis Joglosemar, keberadaan kota-kota kecil diharapkan mampu menjadi counter magnet bagi perkembangan kota-kota

utama, yaitu Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta.

Kecenderungan polarisasi dikhawatirkan terjadi pada koridor tersebut, sehingga perlu dilakukan identifikasi bagaimana fungsi kota-kota kecil di koridor tersebut.

## 2. Metodologi

Obyek penelitian sesuai dengan ruang lingkup yang telah dijelaskan adalah kota-kota kecil yang terletak di Kawasan Joglosemar. Dalam penelitian semua kota kecil yang termasuk dalam wilayah administratif 6 (enam) kabupaten (Semarang, Sukoharjo, Klaten, Sleman, Magelang, dan Temanggung) dan 6 (enam) kota (Semarang, Salatiga, Solo, Klaten, Yogyakarta, dan Magelang).

### b. Model sektor basis

Perhitungan LQ akan menghasilkan informasi mengenai sektor basis yang dimiliki oleh suatu wilayah. Rumus untuk mengidentifikasi sektor basis adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{ps/pi}{Ps/PI}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jika  $LQ \geq 1$  adalah sektor basis, yaitu sektor yang sudah mampu memenuhi kebutuhan permintaan pasar di dalam wilayah dan juga diekspor ke luar wilayah. Namun jika nilai  $LQ < 1$ , berarti sektor non-basis. Artinya bahwa sektor tersebut hanya mampu memenuhi

**TABEL 1. VARIABEL DAN DATA**

Variabel	Data	Sumber Data
Pemusatan wilayah	Jumlah dan Jenis fasilitas	BPS
Spesifikasi kota	PDRB	BPS
Tipologi kota	LPE, Pendapatan per kapita	BPS

Variabel yang dibutuhkan berupa data statistik dari masing-masing kota yang dirinci dalam data desa, seperti dalam tabel.

Penelitian ini menggunakan model kuantitatif, sebagai berikut:

### a. Model pemusatan wilayah

Model ini dibuat berdasarkan rumus Indeks Sentralitas Marshall. Indeks Sentralitas adalah matriks yang menunjukkan fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di wilayah studi, dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas penduduk/masyarakat, untuk mengetahui struktur/hirarki pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan (Riyadi, 2003).

kebutuhan permintaan di dalam wilayah.

### c. Analisis Diskriminan

Analisis diskriminan merupakan metode statistik untuk mengelompokkan obyek penelitian berdasarkan asumsi tertentu. Dalam penelitian ini, asumsi yang digunakan adalah bahwa hirarki kota akan semakin tinggi jika fasilitas semakin lengkap. Asumsi itu kemudian dibandingkan dengan variabel penentu lain, yaitu karakteristik sosial kota-kota kecil. Hasilnya akan menunjukkan perbedaan hirarki antara asumsi dengan kondisi riil.

### 3. Temuan

#### A. Sistem Perwilayahan Berdasarkan Penilaian Aspek Fasilitas

Wilayah akan saling terkait satu sama lain. Keterkaitan antar wilayah diharapkan terjadi dalam bentuk keterkaitan yang sinergis dan bukan saling melemahkan (Anwar dan Rustiadi, 2003). Wujud dari keterkaitan fisik adalah adanya hirarki pemusatan wilayah. Hirarki pemusatan wilayah menunjukkan tingkat pemusatan suatu wilayah, dengan asumsi bahwa akan terjadi keterkaitan fisik. Analisis pemusatan wilayah dilakukan menggunakan data potensi desa, dengan variabel jumlah fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sosial.

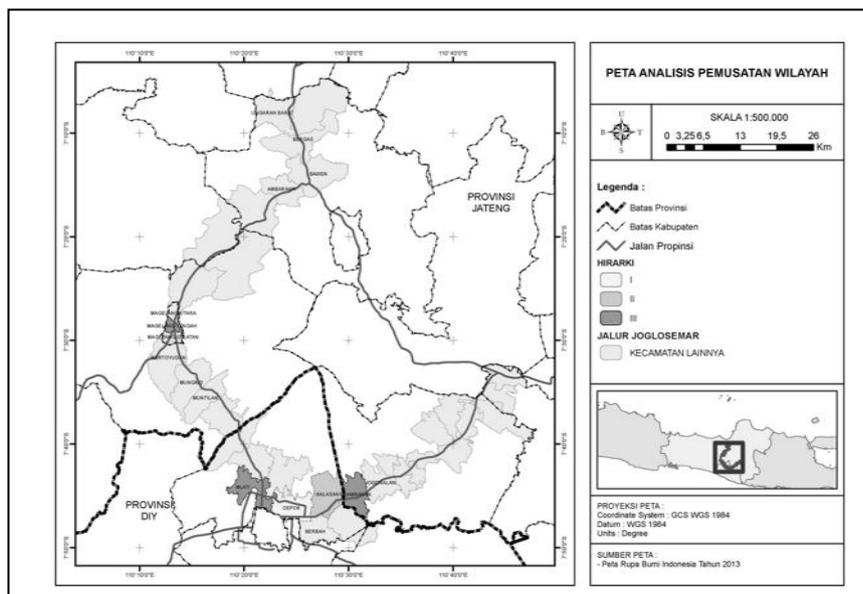
Ketersediaan fasilitas sosial ekonomi merupakan salah satu variabel yang dapat mencerminkan sifat kota di suatu wilayah. Dalam kaitannya dengan aksesibilitas maka dipahami bahwa di wilayah dengan derajat aksesibilitas yang tinggi akan lebih banyak ditemukan fasilitas sosial ekonomi dibandingkan dengan wilayah dengan derajat aksesibilitas yang rendah. Sama halnya

dengan preferensi penduduk untuk bermukim di lokasi dengan derajat aksesibilitas yang tinggi, maka fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari fungsi-fungsi kekotaan ini juga memiliki preferensi untuk menempati lokasi-lokasi dengan derajat aksesibilitas yang tinggi. Hasil analisis pemusatan wilayah dapat dilihat pada tabel 2.

Jika ditinjau dari distribusi spasial, maka pada koridor ekonomi Joglosemar terdapat dua konsentrasi tempat pusat dengan hirarki tinggi, yaitu di bagian tengah dan utara koridor Joglosemar (Gambar 2). Bagian tengah terdiri atas Kecamatan Depok (hirarki I), Kalasan (hirarki II), Mlati dan Prambanan (hirarki III). Sedangkan di bagian utara adalah Kecamatan Magelang Tengah. Hal ini

**TABEL 2. HIRARKI KOTA KECIL DI KORIDOR JOGLOSEMAR**

Hirarki	Kota
I	Depok
II	Kalasan
III	Prambanan, Mlati, Magelang Tengah
IV	Kota-kota lainnya



**GAMBAR 2. PEMUSATAN WILAYAH DI JOGLOSEMAR**

menunjukkan bahwa pola yang terbentuk adalah regional multinodal system. Pola ini menunjukkan adanya hirarki menurun pada tingkat lokal dengan munculnya simpul-simpul baru yang mampu berkompetisi dengan simpul lama. Dalam regional multinodal system, terdapat lebih dari satu simpul kota tradisional. Kota tradisional adalah kota yang sejak awal mempunyai tingkat perkembangan lebih tinggi dibanding kota lain dan menjadi pusat pelayanan wilayah.

Simpul-simpul baru dalam di koridor Joglosemar adalah kecamatan Magelang Tengah, Mlati, Kalasan, dan Prambanan. Kota-kota tersebut memang merupakan kota-kota cepat tumbuh.

Meskipun kota-kota ini berkembang dengan pesat, namun peran kota tradisional masih dominan sebagai pusat aktivitas dan aliran komoditas, (Kota Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta). Namun dalam tataran lokal mulai terjadi aliran horisontal di luar simpul. Aliran ini lebih merata dibandingkan pada sistem nodal. Pola ini menunjukkan integrasi antar pusat kota dalam tingkat yang lebih tinggi. Pada pola ini juga terjadi pola multinodal dalam tataran lokal. Aliran

antar daerah pada tingkat lokal sudah benar-benar terjadi, sedangkan aliran antar simpul dalam konstelasi regional juga telah terbentuk. Secara skematis,

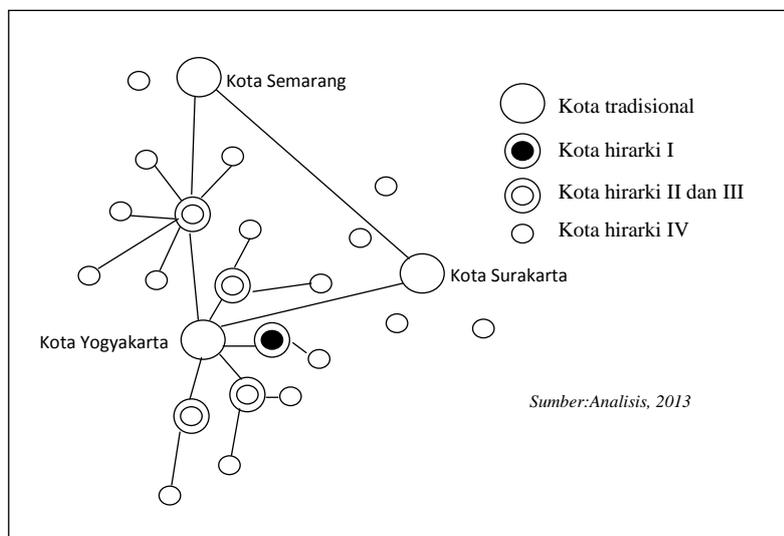
pola *regional multinodal system* ditunjukkan pada gambar 3.

Dalam gambar tampak bahwa hubungan hirarkis antar kota telah terbentuk dalam sistem perwilayahan di koridor Joglosemar. Jika ditinjau secara spasial, distribusi tersebut belum merata. Hal ini dapat dilihat pada kutub Surakarta dan Semarang, yang tidak memiliki kota-kota dengan hirarki II dan III. Hasil tersebut terjadi karena dalam penelitian ini tidak membahas kota-kota di luar jalur regional, sehingga mungkin kota-kota hirarki II dan III di sekitar kutub pertumbuhan Semarang dan Surakarta terdapat pada kota-kota tersebut.

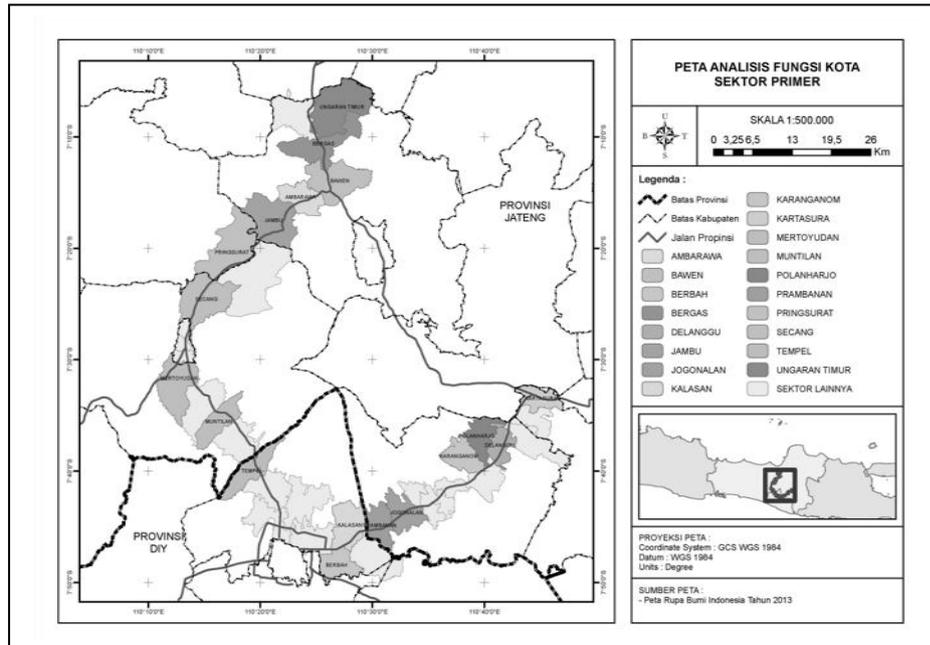
a. Spesialisasi Kota

Wilayah sebagai pusat pertumbuhan harus mempunyai tiga karakteristik (Tarigan, 2004), yaitu:

1. Hubungan internal dari berbagai sektor



**GAMBAR 3. POLA MULTINODA REGIONAL SYSTEM DI KORIDOR JOGLOSEMAR**



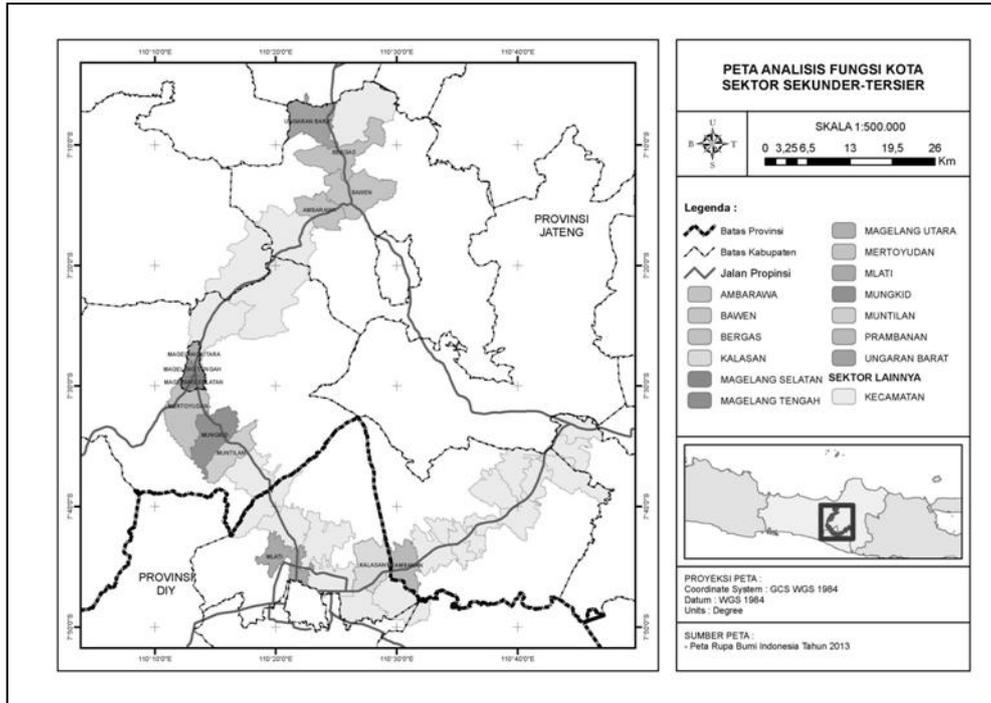
**GAMBAR 4. DISTRIBUSI SPESIALISASI SEKTOR PRIMER DI KORIDOR JOGLOSEMAR**

2. Keterkaitan antar sektor yang menghasilkan efek pengganda (*multiplier effect*)
  3. Konsentrasi geografis berbagai sektor sehingga menciptakan efisiensi.
3. Sektor tersier : Sektor Perdagangan, hotel, dan restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, sewa, dan jasa perusahaan, Sektor jasa

Wujud spesialisasi kota adalah sektor ekonomi yang mendominasi aktivitas ekonomi kota tersebut. Spesialisasi kota kecil diidentifikasi dengan menggunakan metode LQ, yaitu untuk mengidentifikasi sektor basis dan non basis dalam suatu wilayah. Teknik perhitungan dengan membandingkan pendapatan sektor dalam suatu wilayah dengan pendapatan sektor dalam wilayah acuan. Dalam perhitungan tersebut, data yang digunakan adalah data PDRB berdasarkan sektor ekonomi yang meliputi:

1. Sektor primer: Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan penggalian
2. Sektor sekunder: Sektor Industri pengolahan, Sektor Listrik, gas, dan air bersih, Sektor Bangunan

Dari perhitungan LQ, diperoleh hasil bahwa sektor primer masih menjadi sektor basis di sebagian besar kota kecil yang terletak di koridor Joglosemar (Tabel 3) . Namun sektor sekunder dan tersier (non perdesaan) juga mulai berkembang pada koridor ini. Hal ini berarti bahwa kota-kota kecil pada koridor Joglosemar. Distribusi sektor dominan tersebut dapat dilihat pada gambar 4 dan 5. Hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa sektor primer tersebar hampir di seluruh koridor, kecuali bagian tengah (wilayah Magelang dan Sleman). Sedangkan konsentrasi sektor tersier berada pada bagian utara dan tengah koridor ekonomi. Pada bagian utara terdapat di wilayah Bawen, Bergas, dan sekitarnya. Sedangkan bagian tengah adalah wilayah Magelang dan Sleman



**GAMBAR 5. DISTRIBUSI SPESIALISASI SEKTOR SEKUNDER DAN TERSIER DI KORIDOR JOGLOSEMAR**

b. Analisis Tipologi Kota  
 Berkaitan dengan strategi pengembangan wilayah, perlu diketahui bagaimana distribusi tipologi perkotaan yang terdapat di koridor Joglosemar. Tipologi kota merupakan hasil penyimpulan terhadap pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi. Data untuk analisis tipologi kota adalah sebagai berikut:

Analisis tipologi kota dilakukan dengan cara membandingkan laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk kota kecamatan di koridor Joglosemar. Berdasarkan besarnya pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi tersebut, dapat dihasilkan tipologi kota dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kuadran I : Kota maju
2. Kuadran II: Kota maju tertekan
3. Kuadran III: Kota berkembang
4. Kuadran IV: Kota terbelakang



**GAMBAR 6. TIPOLOGI KOTA**

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui distribusi masing-masing kecamatan dalam kuadran tipologi kota (gambar 6). Pendapatan per kapita

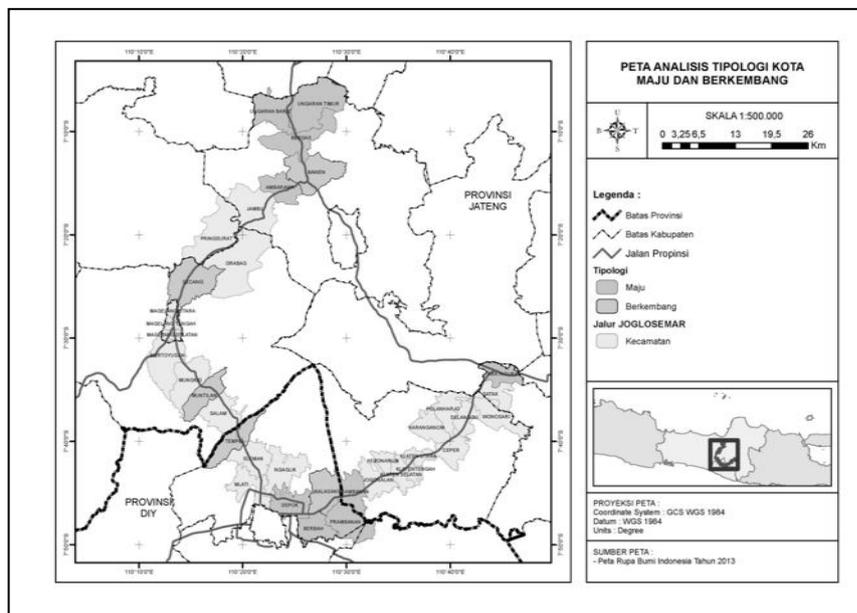
**TABEL 3. PENDAPATAN PER KAPITA DAN LPE**

KECAMATAN	Pendpt/kapita (ratusan ribu)	LPE
Mlati	9,65	1,89
Magelang Tengah	9,74	2,27
Magelang Utara	9,66	2,01
Kartasura	24,86	2,21
Muntilan	9,00	1,75
Delanggu	9,26	0,9
Depok	15,40	3,3
Ungaran Barat	13,15	2,51
Mungkid	9,90	2,07
Karanganom	8,90	1,98
Secang	10,30	1,71
Jogonalan	6,18	0,57
Prambanan	11,23	1,8
Salam	8,90	0,9
Polanharjo	6,78	0,78
Mertoyudan	9,20	1,74
Tempel	9,25	1,56
Berbah	11,34	2,01
Ambarawa	10,98	2,44
Bergas	12,73	2,5
Magelang Selatan	8,98	1,98
Ungaran Timur	10,30	2,11
Pringsurat	5,60	0,67
Prambanan	12,80	1,98
Jambu	6,70	0,77
Bawen	10,74	1,35
Kalasan	12,45	1,34

mempunyai rata-rata Rp. 10.550.000,- per tahun, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata adalah 1,73% per tahun.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, kota-kota di koridor Joglosemar termasuk ke dalam kategori kota yang maju dan berkembang. Pada kota-kota maju, pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi berada di atas nilai rata-rata. Sedangkan pada kota-kota yang berkembang, pendapatan per kapita di bawah rata-rata namun laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata.

Distribusi spasial dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa distribusi kota-kota dengan klasifikasi kota yang maju berada pada tiga simpul (Gambar 7), yaitu utara (dekat kota Semarang), tengah (dekat Kota Yogyakarta) dan timur (dekat Kota Surakarta). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa tipologi kota dipengaruhi oleh jaraknya terhadap kota besar. Hal ini berarti bahwa pusat wilayah berfungsi sebagai tempat terkonsentrasi penduduk (permukiman), pasar bagi komoditi-komoditi pertanian maupun industri, pusat pelayanan terhadap daerah hinterland, dan lokasi pemusatan industri. Sedangkan



**GAMBAR 7. DISTRIBUSI TIPOLOGI KOTA DI KORIDOR JOGLOSEMAR**

hinterland berfungsi sebagai pemasok (produsen) bahan-bahan mentah atau bahan baku, pemasok tenaga kerja, pemasaran barang dan jasa industri (Rustiadi, 2006).

#### 4. Kesimpulan

1. Pemusatan wilayah terjadi pada kota-kota utama, hal ini mengindikasikan adanya *backwash effect*. Fenomena tersebut jika terjadi terus menerus akan mengakibatkan penyerapan sumberdaya dari kota-kota kecil ke kota besar tersebut.
2. Faktor pemusatan wilayah yang paling dominan adalah ketersediaan fasilitas ekonomi. Ukuran pemusatan dengan parameter jumlah fasilitas ini hanya menunjukkan pemusatan berdasarkan banyaknya fasilitas, tetapi tidak dapat menunjukkan fungsi fasilitas tersebut.
3. Berdasarkan analisis spesialisasi wilayah, teridentifikasi adanya spesialisasi di sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat pada hasil perhitungan LQ, yang memiliki angka > 1,0. Namun keberadaan sektor pertanian ini tidak didukung dengan adanya industri pengolahan di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kota-kota kecil masih mempunyai keterkaitan erat dengan wilayah belakangnya (perdesaan). Aktivitas ekonomi yang utama masih didominasi oleh kegiatan di sektor primer/pertanian.
4. Pada wilayah dengan spesialisasi sektor industri, diharapkan wilayah tersebut berada pada kuadran I dalam tipologi kota. Namun Kalasan dan Bawen termasuk di kuadran II, meskipun masih masuk kategori berkembang.
5. Adanya beberapa ketidaksesuaian tersebut mengindikasikan perlunya penataan sistem perwilayahan,

terutama sistem yang berbasis fungsi wilayah.

#### REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2008. *Pengembangan Wilayah : Konsep dan Teori*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. Yogyakarta
- Firman, T., 1992, The Spatial Pattern of Urban Population Growth in Java 1980-1990, *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol 28 No. 2, Jakarta
- Firman, Tommy. 2011. Membangun Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah di Wilayah di Indonesia (Tantangan Pengembangan Wilayah Dalam Konteks Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah). *Orasi ilmiah pada acara dies natalis ITB ke 52 tanggal 2 Maret 2011*. Institut Teknologi Bandung, Bandung
- Glasson. John, 1978, *Introduction to Regional Planning, Concept, Theory and Practice*, Hutchinson, London
- Keban, Yeremias T, 2009. *Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi : Isu Strategis Bentuk dan Prinsip*, dalam [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id), diunduh pada tanggal 23 Januari 2010.
- Laquian, Aprodicio, 2005, *Beyond Metropolis: The Planning and Governance of Asia Mega Urban Regions*, Woodrow Wilson Center Press, Washington DC.
- McGee, T. M. 1992. *The Emergence of Desakota Regions in Asia: Expanding A Hypothesis* dalam McGee dan Ginsburg (eds.) *Extended Mega-Urban Regions in Asia*. Vancouver: UBC Press, pp. 3-25